

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang simbol

Menurut Budiono Herusatoto (2005:10), “kata simbol berasal dari bahasa Yunani *symbolos* yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang sebuah gejala sosial”.

Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat di dalamnya terdapat gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari hubungan interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok sehingga muncul suatu kebiasaan dalam tatanan kemasyarakatan yang disebut kebudayaan, komponen-komponen yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan simbol-simbol.

Menurut Victor Turner (1974:17), upacara ( misalnya “*slametan*”) merupakan aspek agama, yaitu dimana rumus-rumus yang berupa doktrin-doktrin agama berubah bentuk menjadi serangkaian *metaphor* dan simbol. Menurut Turner simbol dalam ritual (upacara keagamaan) pada masyarakat. Dengan mengkaji simbol-simbol yang ada pada ritual tersebut berusaha melihat bagaimana relasi sosial dan struktur sosial yang ada pada masyarakat. Melalui kajian simbol-simbol yang ada dalam ritual dapat dipahami bagaimana cara masyarakat

mempertahankan struktur sosialnya, salah satunya dengan melakukan ritual pada proses *inisiasi* dimana diberi pemahaman mengenai struktur sosial. Menurut Geertz (1973:88):

“Simbol-simbol yang dimiliki manusia terdapat suatu golongan yang merupakan suatu sistem tersendiri yang dinamakan sebagai simbol-simbol suci yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya disebabkan simbol-simbol suci tersebut merupakan etos (*ethos*) dan pandangan hidup (*world view*) unsur hakiki bagi eksistensi manusia dan juga karena simbol-simbol suci terjalin dalam simbol-simbol lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya yang nyata”.

Menurut Clifford Geertz (1973:123) melakukan kajian mengenai agama, mitos dan upacara sebagai jalan untuk memahami bagaimana manusia memahami dan menerima hakekat dari kehidupan sosial di masyarakatnya, dimana simbol menjadi kendaraan yang mengantarkan kepada pemahaman kita (*the vehicle of meaning*). Menurut Geertz (dalam Saifudin, 2004 :288):

“Memandang simbol-simbol adalah garis-garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan; ada dalam hal ini pemikiran manusia dapat dilihat sebagai “suatu bentuk sistem lalu lintas dalam bentuk simbol-simbol yang *signifikan*”. Dengan demikian sumber dari simbol-simbol itu dua, yaitu (1) yang berasal dari kenyataan luar yang terwujud sebagai kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi; dan (2) yang berasal dari dalam dan yang terwujud melalui konsepsi-konsepsi dan struktur-struktur sosial. Dalam hal ini simbol-simbol menjadi dasar bagi perwujudan model bagian dari sistem-sistem konsep dalam suatu cara yang sama dengan bagaimana agama atau keyakinan mencerminkan dan mewujudkan bentuk-bentuk sistem sosial”.

Menurut Talal Asad (1993) simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkaikan hubungan antara benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan suatu konsep dan kompleks yang memiliki makna.

Pendekatan Geertz simbol merupakan hubungan antara pemikiran manusia dan kenyataan yang berasal dari luar maupun dari dalam, berbeda dengan pendekatan Talal Asad yang memandang simbol sebagai perangkat yang merangkai hubungan benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan konsep dan kompleks memiliki makna. Menurut James L. Peacock 1968: 8):

“Pertunjukan ludruk menghadirkan tindakan sosial dalam setiap pertunjukannya dengan “mengajak para partisipannya untuk mengidentikkan diri dengan para pemain yang sedang menjalankan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,” seolah-olah mereka mengalaminya sendiri hal-hal dan situasi-situasi yang sulit dicapai dalam kehidupan nyata. Ludruk kemudian juga mengarahkan para partisipan untuk lebih menyukai peran-peran, situasi-situasi, tujuan-tujuan, atau cara-cara tertentu jika memang kehidupan nyata menyediakan pilihan-pilihan, peran, situasi dan sebagainya yang bisa dipilih oleh seseorang, dan cara-cara yang diciptakan oleh ludruk ini “semakin menjadi tipe yang *kongruen* dengan proses modernisasi”

James L. Peacock (1968:12) melihat hubungan Ludruk dengan proses sosial. Ludruk membantu para partisipannya (baik pemain maupun penonton) untuk memahami gerak ludruk mendorong para partisipannya untuk menghayati secara langsung modus-modus tindakan sosial yang ada dalam proses modernisasi.

Pertunjukan ludruk menghadirkan tindakan sosial dalam setiap pertunjukannya dengan mengajak para partisipannya untuk mengidentikkan diri dengan para pemain yang sedang menjalankan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ludruk dianalisis sebagai tindakan-tindakan simbolik yang menghadirkan klasifikasi-klasifikasi simbolik dan konsep-konsep tindakan sosial. Dipahami bagaimana tindakan-tindakan simbolik dari pertunjukan Ludruk mendorong proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat Jawa.

Pemahaman simbol di dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki warna, bagaimana simbol dimaknai, dipahami, dan dikonsepsi berdasarkan keadaan sosial yang relevan terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti Victor Turner melihat konsep simbol di dalam ritual keagamaan, dimana simbol-simbol yang di dalam ritual keagamaan memuat doktrin-doktrin agama berubah bentuk menjadi serangkaian *metaphor* dan simbol untuk melihat cara masyarakat mempertahankan struktur sosialnya.

Geertz melihat konsep simbol sebagai sistem makna melalui kajian mengenai agama, mitos dan upacara keagamaan sebagai jalan untuk memahami dan menerima hakekat dari kehidupan sosial dimasyarakatnya. Talal Asad melihat simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkaikan hubungan antara benda atau peristiwa merupakan suatu konsep yang memiliki makna. James L. Peacock mencoba melihat konsep simbol dalam pertunjukan Ludruk dianalisis sebagai tindakan-tindakan simbolik yang menghadirkan klasifikasi simbolik dan konsep-konsep tindakan sosial yang mendorong proses modernisasi.

Berdasarkan uraian-uraian teori di atas simbol memberikan informasi yang jelas, dan nyata. Simbol mengandung sistem makna bagi kehidupan masyarakat yang memilikinya dengan cara melihat dan memaknai keberadaan simbol tersebut, seperti penggunaan konsep simbol untuk suatu kepentingan dalam kehidupan sosial yang relevan jika tindakan simbolik menghadirkan klasifikasi simbolik dan konsep tindakan sosial yang mendorong proses modernisasi, seperti penggunaan simbol untuk kepentingan ekonomi dan politik.

## B. Tinjauan Agama

Agama memungkinkan manusia melakukan hal-hal paling besar yang mampu dilakukannya, dan menyebabkan orang dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain, memberikan kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan, dan kesadaran akan tujuannya, memberikan semuanya ini dalam bentuknya yang mutlak.

Menurut Geertz, (1973c:90) “agama merupakan suatu sistem simbol yang bertindak untuk menetapkan perasaan-perasaan (*moods*) dan motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh, dan bertahan lama pada diri manusia”.

Dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai suatu hukum (order) yang berlaku umum berkenaan dengan eksistensi (manusia), dan menyelimuti konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura tentang yang mencerminkan kenyataan, sehingga perasaan-perasaan motivasi-motivasi tersebut nampaknya secara tersendiri (unik) adalah nyata ada. Ia memandang agama sebagai kebudayaan sebagai pola bagi kelakuan, dimana simbol-simbol yang dimiliki suatu kelompok menjadi suatu sistem di dalam kelompok tersebut sebagai simbol-simbol suci yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya. Menurut Emile Durkheim dalam Saifuddin, (2011:74):

“Agama adalah pusat kebudayaan karena agama memiliki kekuatan terbesar untuk mengendalikan semua aspek kehidupan manusia. Hal ini karena hanya agama yang dapat menjelaskan hakikat keberadaan manusia itu sendiri, dari mana datang, apa tugasnya hidup di dunia dan akan kemana jika ia meninggal. Tak satupun unsur kebudayaan yang dapat menjelaskan hal itu kecuali agama. Diperkuat agama bukan hanya bagian dari kebudayaan tetapi juga inti kebudayaan”.

Kekuataan besar yang dapat mengendalikan aspek kehidupan manusia, dimana keberadaan agama memiliki peran untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh bidang kajian ilmu-ilmu lain. Sedangkan secara jelas dimuat dan dijelaskan oleh ilmu agama diperkuat lagi dengan agama sebagai inti dari kebudayaan manusia bukan hanya sekedar kebudayaan itu sendiri.

Menurut Saifuddin, (2011:75), “terjadi pergeseran cara pandang terhadap agama sebagai (inti) kebudayaan dari *positivisme konstruktivisme* yang sejalan dengan pergeseran posisi manusia dari subjektif ke objektif”. Implikasi dari *subyektifikasi* manusia dalam pandangan *konstruktivisme* adalah bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, kreatif, produktif, dan bahkan *manifulatif* dalam kebudayaannya. Kepentingan manusia tidak hanya memiliki pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai agama yang diwarisisnya dari generasi sebelumnya tetapi juga mampu menginovasi dan menggunakan agama itu untuk berbagai konteks kepentingan hidup. Menurut Geertz dalam Saifuddin, (2011:70):

“Agama adalah suatu sistem simbol yang bertindak sebagai penguatan gagasan dan kelakuan dalam menghadapi kehidupan, yang dengan simbol-simbol itu konsep-konsep yang abstrak diterjemahkan menjadi lebih konkrit, menjadi aura yang menyelimuti konsepsi-konsepsi yang tidak nyata menjadi seolah-olah nyata hadir di dalam kehidupan. Menurut Geertz Agama adalah sistem lambang yang berfungsi menegakkan berberbagai perasaan dan motivasi yang kuat, berjangkauan luas dan abadi pada manusia dengan merumuskan berbagai konsep mengenai keteraturan umum eksistensi, dan dengan menyelubungi konsepsi-konsepsi ini dengan sejenis tuangan faktualitas sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi itu secara unik tampak *realistik*”.

Penyelewengan terhadap tujuan peribadatan yang benar merupakan *esensi* bagi, yang berlawanan dengan agama adalah bentuk “*missa hitam*”, dimana benda-benda dan fakta-fakta *sacral* diputar balikan untuk tujuan-tujuan anti sosial. Hal itu dimungkinkan karena agama itu sendiri dalam realitas empiriknya dapat

dipahami sebagai suatu cara pemberian makna suatu simbol-simbol agama dari pada pendukung agama yang dimaksud yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Oleh karena itu agama dapat di tanggapi sebagai sistem kebudayaan. Jadi pada dasarnya agama dalam praktiknya dapat digunakan untuk melihat kaitan antara sistem kebudayaan yang berupa sistem simbol dan sistem tindakan agama.

Jika demikian agama di dalam praktiknya di tengah kehidupan sosial dapat diartikan sama dengan sistem kebudayaan yang biasa terwujud melalui sosialisasi, kulturisasi dan sifatnya turun-menurun dari generasi ke generasi. Akibatnya hubungan antara simbol-simbol agama dan kebudayaan dengan makna-makna yang selalu dipahami pendukungnya. Pada umumnya simbol-simbol agama merupakan hal yang suci (*sacral*).

Sehingga dalam dewasa ini agama dan simbol-simbol agama secara *imajinatif* digunakan untuk kepentingan-kepentingan kehidupan sosial dan politik. Demokrasi yang menimbulkan banyak bermunculnya organisasi politik berupa partai politik. Selain menggunakan peran simbol etnik untuk mengambil simpatik yang berlatarbelakang suku, peran simbol keagamaan dapat dimanipulasi oleh elit politik sebagai alat memperoleh kekuasaan.

Menurut D. Hendropuspito O.C, (1983:101), gambaran mengenai fakta-fakta simbol agama yang dipunyai oleh sejumlah agama besar yaitu:

a) Lembu

Lembu merupakan lambang kesatuan dari Agama Hindu, lembu menyatakan penghormatan kepada lembu adalah peristiwa sentral dari *hinduisme*, satu-

satunya kepercayaan konkret bersama seluruh umat Hindu. Maka dari itu lembu sebagai simbol suci memberikan sumbangan bagi *ethnosentrisme* dan dari situ terbentuk solidaritas kaum hindu.

Tabel 2. Contoh simbol dalam agama Hindu

Jenis	Ungkapan/Bentuk.
Kata	Om Swastyastu dan Svaha.
Objek	Udeng, kebaya, dan kamben
Barang/benda	Pura, patung Dewi Saraswati, patung Dewa Syiwa, patung Dewa Brahma, dan patung Dewa Wisnu
Tindakan	Mecakupkan tangan, dan bersila
Peristiwa	Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Ngaben

Simbol-simbol pada tabel memberikan informasi mengenai keberadaan dan perlambangan kehidupan umat Hindu dengan melihat atau mendengar simbol tersebut secara langsung maupun tidak dapat mengenali keberadaan agama Hindu.

#### b) Bulan dan Bintang

Bagi umat Islam gambar bulan bintang dan gambar Ka'abah merupakan simbol persaudaraan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Pada simbol-simbol tersebut seakan-akan kepercayaan dan perasaan setiap orang Islam dari semua warna kulit, suku, dan bangsa dituangkan serta dipersatukan. Khusus di Indonesia misalnya gambar Ka'abah dijadikan lambang persatuan semua aliran politik yang diilhami kepercayaan Islam.



Tabel 3. Contoh simbol dalam Agama Islam

Jenis	Ungkapan/Bentuk
Kata	Allahu akbar, Assalamualikum Wr.Wb, dan Bismilahiromanirohim
Objek	Ka'abah, Masjid, Gelar H (haji), HJ (hajjah)
Barang/benda	Peci, Mukenan, Sajada, Tasbi, Sarung, Jubah, dan Sorban,
Tindakan	Sujud, Rukuk, Membuka kedua tangan, Gerakan sholat
Peristiwa	Idul fitri, Idul Adha, Puasa Ramadhan, dan Tahun Baru Islam,

Simbol-simbol pada tabel memberikan informasi mengenai keberadaan dan perlambangan kehidupan umat Islam dengan melihat atau mendengar simbol tersebut secara langsung maupun tidak dapat mengenali keberadaan agama Islam.

#### c) Salib

Kaum Kristen menganggap fenomena gereja diyakini sebagai simbol dengan nama Tuhan dan *salib* yang berkarya menyelamatkan umat manusia sesuai dengan rencana dan kehendaknya.

Tabel 4. Contoh simbol dalam agama Kristen.

Jenis	Ungkapan/Bentuk
Kata	Haleluya, dan Syalom
Objek	Yerusalem, Sion, dan Pohon anggur
Barang/benda	Salib, Patung Bunda Maria/Yesus, Rosario, dan Jubah Pendeta Minyak urapan, Roti dan Anggur perjamuan
Tindakan	Menutup mata, Melipat tangan, dan Mengangkat tangan untuk Memberkati, Berlutut, dan Pelayanan Sakramen
Peristiwa	Natal, Tahun Baru, dan Paskah

Simbol-simbol pada tabel memberikan informasi mengenai keberadaan dan perlambangan kehidupan umat Kristen dengan melihat atau mendengar simbol tersebut secara langsung maupun tidak dapat mengenali keberadaan agama Kristen.

Kedudukan simbol dan tindakan simbolis keagamaan membentuk emosi keagamaan atau tingkat kecintaan terhadap agama yang dimiliki oleh pemeluk agama tersebut. Emosi keagamaan ini akan meningkatkan kekuatan-kekuatan emosi di dalam kelompok beragama itu sendiri, dapat memunculkan kelompok-kelompok dengan emosi keberagamaan yang sama memungkinkan terbentuknya suatu kelompok untuk memperoleh suatu kekuasaan.

### **C. Tinjauan Tentang Kekuasaan.**

Konsep kekuasaan mendasar di dalam ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik khususnya. Permasalahan yang terdapat dalam politik tidak terlepas dari permasalahan kekuasaan yang merupakan sentral permasalahan di dalam politik. Setiap individu memiliki peluang untuk memiliki kekuasaan tergantung besar modal sosial yang dimiliki, bagaimana seorang dapat memengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginannya hal tersebut tidak lain bagian kecil dari kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai *power* di dalam proses kehidupan bermasyarakat. Menurut Michael Foucault dalam Adurrahman Wahid, (1993:39-40), “kekuasaan bukan merupakan sesuatu yang ada, kekuasaan sama dengan banyak relasi kekuasaan yang bekerja di salah satu ruang atau waktu, kekuasaan secara

*konvensional* dipahami bahwa kekuasaan itu menindas, menjadi kekuasaan itu memproduksi kebenaran”.

Melihat kekuasaan tidak berdiri sendiri dengan banyak relasi, serta kekuasaan dipahami menindas menuju arah kekuasaan memproduksi kebenaran ketika kekuasaan dipandang secara *konvensional*, kekuasaan memungkinkan tindakan-tindakan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat seolah benar. Menurut Michael Foucault dalam Sulistyawati Irianto (2006:19):

“Pengetahuan dan kekuasaan bukanlah entitas yang berbeda. Kebenaran pengetahuan sebenarnya bukan masalah kesesuaian pikiran (teori) dengan realitas diluar pikiran tapi masalah bagaimana *form of knowleged* ilmiah ataupun dibentuk aturan lain khusus yang berupa proporsi, dapat dinyatakan dalam suatu perbincangan, kebenaran merupakan pengetahuan adalah masalah politik *diskhurus* (masalah kekuasaan). Menurut Michael Foucault Kebenaran merupakan efek dari suatu hubungan kekuasaan yang membentuk suatu kehidupan tertentu, kekuasaan merupakan berbagai cara orang untuk terikat di dalam suatu sistem kekuasaan/pengetahuan yang intinya bersifat semena-mena. Mencirikan hubungan kekuasaan ini dalam istilah pertarungan dan konflik yang serampangan dan terus-menerus.

Menurut Samuel P. Huntington dalam Muhtar Yahya, (2007:10) Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mengubah perilaku orang lain atau kelompok lain yang dapat dilakukan secara *persuasive, koersif*, atau dengan teguran. *Power* mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginan tertentu baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.

Menurut Michael Foucault dalam Saifuddin, (2011:210) “kekuasaan sebagai *authority* (otoritas)”. Maka kekuasaan biasanya dianalogikan dengan sistem birokrasi (pemerintahan) dalam masyarakat yang bersangkutan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan warga masyarakat, kecuali dalam hal menerima konsekuensi kekuasaan. Konsep manusia sebagai makhluk berpikir dan bertindak

kekuasaan *authority* harus dibedakan dari kekuasaan *power*. Berdasarkan konsep ini kekuasaan berada pada semua orang bahkan seorang pengemis sekalipun.

Kekuasaan memberikan peluang orang ataupun kelompok untuk dapat memiliki posisi menentukan kebijakan dan keputusan publik, hal ini memungkinkan posisi kekuasaan menjadi kompetisi elit politik untuk memperolehnya. Sangat penting makna kontestasi dan kekuasaan apabila kedua kata ini digabung menjadi satu yaitu kontestasi kekuasaan, relevan bagi memahami kondisi negeri kita dan juga relevan untuk memahami kondisi di Lampung.

Konsep kontestasi kekuasaan dengan cepat diterapkan dalam lapangan praktis, khususnya politik praktis sebagai contoh bermunculnya pemekaran daerah, persengketaan batas wilayah, *revitalisasi* aturan adat, lahirnya kembali konsep putra daerah, maraknya aliran agama-agama baru, bentrokan antara penganut agama, fenomena upaya pelepasan diri dari NKRI dan sebagainya.

#### **D. Tinjauan Tentang Politik dan Elit Politik**

Politik merupakan seni dalam mempengaruhi orang lain, politik bukan hanya dapat dilakukan oleh penguasa, dimana anak bayi sekalipun dapat berpolitik dengan demikian politik memiliki makna yang sangat luas. Menurut Machiavelli dalam Hertanto (2006:2), “politik merupakan “*the ends justify the means*” (tujuan menghalalkan cara)”.

Menurut Harold Lasswell dalam Ramlan Surbakti (1992;1), “merumuskan politik sebagai “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia hidup dalam politik, hanya

dalam politik manusia dapat memperoleh sikap moral yang tinggi, dengan urusan-urusan yang mencakup masyarakat banyak dibicarakan, diperdebatkan, dan menentukan tindakan-tindakan untuk kebaikan bersama sebagai kepentingan umum.

Elit politik merupakan bagian terpenting sebagai wadah yang menggunakan *power* politik untuk melakukan tindakan-tindakan politik. Elit politik adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kontrol proses politik dan konsekuensi-konsekuensi kebijaksanaan orang-orang yang langsung dalam menghasilkan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Menurut Gaetano Mosca dalam Ramlan Surbakti (1992:75), melukiskan distribusi kekuasaan dalam masyarakat:

a. Kelas memerintah

Sedikit orang (elit) melaksanakan fungsi politik monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan.

b. Kelas diperintah

Jumlah lebih banyak diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum dan paksaan.

Elite politik digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. *Elite Konservatif* (sikap dan perilaku yang mendorong memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkan.

Elit politik dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan bersifat tertutup dalam artian menolak golongan yang bukan elit politik masuk ke dalam lingkungan elit politik. Namun sesama elit politik terdapat

kolaborasi untuk mempertahankan keadaan oleh karena itu pelapisan politik tidak hanya membentuk piramida dan *hearki* tetapi tidak juga tanggapan atas *aspirasi* dari masyarakat.

## 2. Elit Politik Liberal

Sikap dan perilaku yang membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat untuk meningkatkan status sosial bersikap terbuka, dimana masyarakat yang bukan merupakan elit politik dapat menjadi bagian dari lingkungan elit sepanjang yang bersangkutan mampu bersaing sehat. Elit politik cenderung berorientasi pada kepentingan masyarakat umum sehingga dapat memperoleh tanggapan untuk aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

## 3. Elit Politik Pelawan Elit (*Counter elite*)

Para pemimpin yang berorientasi pada rakyat dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (*established order*) maupun dengan cara menentang segala bentuk perubahan.

Klasifikasi elit politik tersebut memang kurang tepat untuk menggambarkan keadaan di Indonesia. Menurut Herbert Feith dalam Ramlan Surbakti (1992:77), Elit politik di Indonesia yaitu pembina solidaritas (*solidarity maker*) dan *administrator*. Pembina solidaritas menonjol dari segi kemampuannya menggalang persatuan bangsa sedangkan administrator menonjol dalam kemampuannya merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Elit dalam penelitian ini elit politik yang terlibat dalam proses menyongsong Pilgub Lampung.

### **E. Tinjauan Tentang Kontestasi**

Menurut Saifuddin, (2011:208), kontestasi merupakan terjemahan dari kata *Contestation* yang artinya perlombaan, jika dikaitkan dengan konteks politik maka maknanya menjadi pertarungan antara kepentingan partai politik yang memiliki warna sehingga membentuk suatu ajang yang menarik yang akan menghasilkan suatu warna demokrasi perpolitikan.

Menurut Pradipto, dalam Rahmat Hidayat (2007), “konsep kontestasi dalam pandangan dipakai untuk menggambarkan adanya perjuangan, perebutan, dan perdebatan ketika pengetahuan dibentuk dalam kontestasi kekuasaan”.

Michael Foucault, dalam Rahmat Hidayat (2007), kontestasi dipahami sebagai upaya penggambaran adanya persaingan dan perjuangan dalam hubungan-hubungan atau interaksi dimana nantinya akan muncul pemenang yang tetap bertahan, dalam kontestasi terdapat beberapa pihak dengan kepentingan berbeda yang menimbulkan suatu persaingan yang secara alami.

Pradipto, dalam Rahmat Hidayat (2007), Kontestasi ini berlangsung dalam sebuah relasi sosial di dalamnya saling mendukung, berjuang, bersaing, dan menghancurkan. Kontestasi dalam penelitian ini yaitu kontestasi elit politik dalam menyongsong Pilgub Lampung yang menggunakan simbol agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan.

## **F. Tinjauan Tentang Pilgub.**

Pilgub merupakan bagian dari salah satu bentuk pemilihan umum di dalam memilih kepala daerah, dilakukan secara demokrasi oleh semua masyarakat di daerah tersebut kelompok ini merupakan elit (elit politik) yang menguasai jabatan negara, ekonomi, dan kekayaan. Semaraknya dinamika politik dengan adanya pesta demokrasi di tingkat pusat dan daerah, kehidupan demokrasi membuka lebar peluang setiap orang yang mau dan mampu terlibat dalam politik praktis untuk menjadi sosok pemimpin daerah.

Menurut Montesquieu dalam Hertanto, (2006:120), “Memisahkan tiga aspek kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif, dengan adanya pemisahan kekuasaan ini akan terjamin kebebasan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah”.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) dan revisinya berbagai kebijakan penjelasan teknisnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengeseran dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membuat pesta demokrasi di provinsi Lampung semakin menarik untuk dibicarakan. Kemajemukan Agama yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Lampung serta simbol-simbol keagamaan dapat digunakan dan dimanipulasi oleh elit politik sebagai alat memperoleh kekuasaan.



### **G. Tinjauan Tentang Manipulasi.**

Menurut Michael Foucault dalam Saifuddin, (2011:209) “mengemukakan bahwa manusia seyogyanya dipandang sebagai makhluk yang mampu berpikir sendiri, sehingga sebagai konsekuensinya manusia dapat memproduksi, mengkreasi dan memanipulasi sesuatu”.

Sebagai makhluk yang berpikir manusia dapat menciptakan pemikiran-pemikiran mengkreasikan serta memanipulasi pemikiran-pemikiran tersebut sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan dan tingkat kebutuhan hidup mereka. Sehingga manipulasi merupakan bentuk pemikiran manusia yang ditujukan untuk memperoleh kebutuhannya yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan.

Menurut Abdul Muhr (2003:74):

“Melalui media informasi manusia menjadikan kehidupan sehari-hari menjadi fenomena yang bertentangan, sisi kesadaran manusiawi dan sisi pengetahuan manusia pada saat yang sama cenderung menggunakan pengetahuan untuk melegalisasi tindakan manipulasi, bertentangan dengan semangat intelektual yang mendasari pengetahuan itu sendiri”

Manipulasi merupakan tindakan mempengaruhi orang lain tanpa disadari atas pengaruh yang diberikan tersebut sebenarnya untuk memperoleh sesuatu (kekuasaan). Politik harus mampu membedakan dan memperhatikan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan golongan secara profesional, kurang jelasnya kedudukan dan hak-hak serta kepentingan keduanya memberikan peluang terjadinya manipulasi kepentingan, fungsi, kedudukan serta hak seseorang.

Manipulasi fungsi dan kedudukan dalam banyak hal justru dapat memunculkan terjadinya penyelewengan dilakukan oleh yang memiliki kekuasaan yang dapat dilakukan oleh berbagai elit lembaga sosial, ekonomi, dan politik. Pada penelitian ini manipulasi yang dimaksud yaitu manipulasi yang dilakukan pada simbol agama dan kekuasaan oleh elit politik dalam menyongsong Pilgub Lampung.

## **H. Kerangka Pikir**

Diberlakukannya UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan revisinya berbagai kebijakan penjelasan teknisnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengeseran dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membuat pesta demokrasi di provinsi Lampung semakin menarik untuk dibicarakan.

Kemajemukan agama yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Lampung simbol keagamaan dapat dimanipulasi oleh elit politik. Terbukti dalam atribut-atribut, kontestasi kandidat yang memperlihatkan tingkat ketaatan dengan menggunakan gelar keagamaan seperti misalnya dalam penggunaan gelar Hj.

Tidak hanya itu, kandidat yang menyampaikan simbol agama menggunakan perlengkapan berupa jam, cincin, kalung, peci, udeng, dan kalimat-kalimat keagamaan yang secara tidak langsung menggambarkan identitas agama.

Simbol agama digunakan sebagai alat memperoleh kekuasaan, selain memang ada golongan politis yang mengatas nama partai agama tertentu simbol agama tetap menjadi alat yang dimanipulasi di dalam politik untuk mendapatkan dukungan dan memperoleh tujuan tersebut. Dengan demikian perspektif tersebut, maka

kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana simbol agama dimanipulasi oleh elit politik untuk memperoleh kekuasaan.

Untuk lebih memperjelas kerangka pikir ini di gambarkan dalam bentuk sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.

